

REKONSTRUKSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI PEMERINTAHAN TINGKAT RT/RW

Oleh: Bambang Widarno dan Suharno

Abstract

Governance in level of RT/RW represent level of lowest governance at one blow as back part harpoon from grand system of governance of exist in Indonesia. Pattern of Management system of good governance have righteously reach system of governance in level of RT/RW of according to reform trust. Problem of RT/RW do not limited to the hygiene problem, work to devote, security, social and the other classic problem. But there is dissimilar problem which during the time not yet got good attention and serious the than manager RT/RW, governmental, and also citizen of meaning will be important of management of better administration with applying of accountancy of RT/RW to increase quality of presentation of finance information. Applying of accountancy in level of RT/RW conducted to increase accountability, function manajerial, transparency, and balance usher generation. Although Standard of Accountancy of Governance only arrange in level of central government and also area, but accountancy RT/RW remain to be applicable according to principle accepted by a public although with a few the exemption. Accountancy of RT/RW made by more simple remember ability of accountancy of citizen of society which relative lower. Payes manager of low RT/RW and lack of support from area Government can become constraint in applying of accountancy RT/RW, for that require to be done by a more wise approach and strategy how accountancy of enforceable RT/RW better. Financial statement of RT/RW consisted of by Balance sheet of RT/RW and Cash flow statement; therewith enlist its supporter like: Daily Cashbook, Enlist Supply, Enlist Plant Asset, Enlist Citizen Deposit, Enlist Citizen Loan, Card of Saving and lending Citizen, and Enlist Contribution Giver.

Keyword: *Standard of Governance Accountancy, Accountancy RT/RW, Balance Sheet of RT/RW and Cash flow statement, Daily Cashbook, Enlist Supply, Enlist Plant Asset, Enlist Citizen Deposit, Enlist Citizen Loan, Card of Saving and lending Citizen, and Enlist Contribution Giver.*

A. Latar Belakang

Pemerintahan di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) merupakan tingkat pemerintahan paling rendah sekaligus sebagai ujung tombak dari *grand system* pemerintahan yang ada di Indonesia. Pola pengelolaan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) sudah selayaknya menjangkau sistem pemerintahan di tingkat RT/RW sesuai amanah reformasi.

Salah satu tuntutan reformasi adalah pengelolaan pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun

dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pernyataan dalam standar tersebut adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Daerah dimaksud juga untuk daerah tingkat I (propinsi) dan tingkat II (Kotamadya/ Kabupaten) serta Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya.

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban dari suatu institusi untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Bagi pihak yang berkepentingan, laporan keuangan bukan hanya sekedar kumpulan angka, melainkan juga menunjukkan kondisi yang sedang dihadapi oleh institusi terkait, sehingga dapat disusun suatu model perencanaan yang tepat untuk mencapai tujuan (Sofyan Safri, 2005: 5).

Mengenalkan dan memahami pengetahuan akuntansi secara utuh kepada masyarakat bukan merupakan hal yang mudah, dan juga pada akuntansi sektor publik. Sebenarnya akuntansi bukan suatu pelajaran yang sulit. Pengenalan akuntansi harus dilakukan dengan penuh kearifan, strategi, dan pertimbangan agar pengetahuan akuntansi dipahami dengan persepsi yang baik. Dengan pemahaman yang baik diharapkan akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan wawasan berpikir seseorang yang positif dan konstruktif.

Saat ini pengelolaan RT dan RW belum menggunakan pendekatan akuntansi. Diharapkan dengan pendekatan sistem akuntansi akan meningkatkan kualitas penyajian informasi untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Kualitas informasi yang tinggi akan memberi kepuasan yang tinggi pula bagi pemakainya, dalam hal ini masyarakat dan pemerintah.

Dengan adanya penerapan akuntansi RT dan RW diharapkan akan meningkatkan:

1. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pengurus RT dan RW.
2. Fungsi Manajerial, yaitu membantu para pengguna (masyarakat dan struktur pemerintah di atasnya) untuk mengevaluasi kinerja pengurus RT dan RW dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengurus RT dan RW dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan antar generasi, yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan pada periode pelaporan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Kesenambungan antar generasi, yaitu turut membantu memberikan cukup informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas yang dikuasai/dikelola oleh

suatu RT dan RW dari pengurus RT dan RW periode sebelumnya kepada pengurus RT dan RW penerus.

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji penerapan akuntansi sektor publik di pemerintahan tingkat RT/RW, yang implikasinya diharapkan bisa diterapkan oleh pihak-pihak terkait seperti: Pengurus RT/RW, perangkat desa/kelurahan dan seterusnya sebagai pedoman.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Elemen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan Pemerintah daerah terdiri dari:

a. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah, yaitu aset, hutang, dan ekuitas pada suatu periode tertentu.

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam suatu periode tertentu yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan atau ketentuan perundang-undangan

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan kegiatan/aktivitas pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD dan kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Catatan ini juga menyampaikan ikhtisar pencapaian kinerja selama periode tertentu, kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan masing-masing perkiraan laporan keuangan dan informasi tambahan yang diperlukan.

B. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Tidak termasuk dalam pengertian pendapatan adalah peningkatan aktiva yang timbul dari pembelian harta, hibah, pinjaman, ataupun koreksi surplus defisit. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan pusat pertanggungjawaban (Indra Bastian, 2003: 52).

Pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi (diterima) atau cukup pasti akan segera terealisasi. Dengan demikian kebijakan pengakuan pendapatan dilakukan dengan menggunakan basis kas.

C. Kebijakan Akuntansi Belanja/Biaya

Belanja/biaya adalah penurunan aktiva atau kenaikan hutang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Belanja/biaya diklasifikasikan menurut penggunaan belanja/biaya dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja/biaya dirinci

berdasarkan kelompok dan jenis belanja/biaya, sedangkan pusat pertanggung jawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah (Indra Bastian, 2003: 53)

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Dengan demikian kebijakan pengakuan belanja/biaya dilakukan juga dengan menggunakan basis kas.

D. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam satu periode akuntansi. Sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan pengeluaran daerah.

Menurut Abdul Halim (2004: 75) penerimaan daerah adalah sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran, namun belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Sumber penerimaan daerah antara lain:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
2. Transfer dari dana cadangan
3. Penerimaan pinjaman dan obligasi
4. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan .

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah.

Sedangkan pengeluaran daerah adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran (Abdul Halim, 2004: 76). Kelompok pembiayaan pengeluaran daerah terdiri dari atas:

1. Transfer ke dana cadangan
2. Penyertaan modal
3. Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo
4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

E. Kebijakan Akuntansi untuk Aktiva

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 63) aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomi adalah sumber daya alam. Aktiva diklasifikasikan menjadi:

1. Aktiva lancar

Yaitu sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai dalam satu periode akuntansi. Termasuk dalam kelompok aktiva lancar antara lain: kas, piutang dan persediaan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan persediaan dicatat sebesar (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Investasi jangka panjang

Yaitu penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau satu

periode anggaran. Termasuk investasi jangka panjang antara lain: penyertaan modal pemerintah pada BUMD dan investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3. Aktiva tetap

Yaitu aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu periode anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya. Termasuk aktiva tetap antara lain adalah: tanah, inventaris, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aktiva tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aktiva tetap dicatat sebesar biaya perolehan, dan apabila tidak memungkinkan maka dapat didasarkan atas nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aktiva tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aktiva tersebut.

Biaya perolehan aktiva tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aktiva tetap tersebut (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005: 65).

4. Dana cadangan

Yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran.

5. Aktiva lain-lain

Yaitu aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam aktiva lain-lain seperti: piutang angsuran, BOT (*Built, Operate, and Transfer*), dan bangunan dalam pengerjaan.

F. Kebijakan Akuntansi Hutang/Kewajiban

Hutang/kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu (Indra Bastian, 2003: 60). Kewajiban dikelompokkan menjadi:

1. Hutang/kewajiban lancar (jangka pendek)

Yaitu hutang/kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran (12 bulan). Termasuk dalam hutang lancar adalah bagian lancar hutang jangka panjang dan hutang perhitungan pihak ketiga.

2. Hutang/kewajiban jangka panjang

Yaitu hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Hutang/kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat dikur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dan pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, serta dicatat sebesar nilai nominal (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005: 66)

G. Kebijakan Akuntansi untuk Ekuitas dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dan jumlah hutang. Termasuk dalam ekuitas dana antara lain:

1. Ekuitas dana umum

Yaitu jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari donasi dan cadangan. Ekuitas dana umum diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.

2. Ekuitas dana dicadangkan

Yaitu jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan. Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

3. Ekuitas dana donasi

Yaitu jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi. Ekuitas dana donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang telah diakui dalam periode berjalan.

METODE PENELITIAN

A. Lingkup Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari tujuannya termasuk kategori penelitian dasar. Penelitian ini mencoba mengembangkan konsep teori (akuntansi) yang telah baku atau terstandarisasi ke dalam tingkatan yang lebih spesifik yang belum diatur. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Pemerintahan Kota Surakarta.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini kebanyakan menggunakan data primer dibandingkan data sekunder. Data yang diperoleh juga kebanyakan berupa data kualitatif dibandingkan kuantitatif. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Daftar aset (lancar dan tetap) yang dimiliki/dikuasai RT/RW
2. Daftar hutang RT/RW kepada pihak III atau masyarakat.
3. Data jenis bantuan dari Pemkot. dan DPU yang diterima oleh RT/RW melalui kecamatan dan kelurahan/desa.
4. Data pemberi bantuan (hibah) yang diterima RT/RW
5. Data pembangunan fisik dan nonfisik di wilayah RT/RW.
6. Sumber penerimaan dana RT/RW
7. Daftar pengeluaran/belanja RT/RW

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, dilakukan dengan aparaturnya pemerintah mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah atau Kepala Desa, LPMK, Camat maupun aparaturnya di Pemerintah Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
2. Dokumentasi, berupa arsip dokumen atau bukti yang relevan dengan tujuan penelitian, mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan dan kotamadya/ kabupaten serta instansi terkait seperti Bappeda.
3. *Public hearings*, menggali masukan dan meminta tanggapan dari para akademisi maupun stakeholder demi kesempurnaan dan keterterimaan akuntansi RT/RW.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem akuntansi RT dan RW dilakukan dengan mengidentifikasi tentang:

1. Deskripsi kegiatan RT/RW
2. Fungsi yang terkait dalam struktur RT/RW
3. Informasi yang diperlukan oleh pengurus RT/RW
4. Dokumen yang digunakan RT/RW
5. Laporan akuntansi yang digunakan RT/RW
6. Unsur sistem pengendalian intern

Proses penyiapan rancangan penerapan akuntansi RT dan RW disesuaikan dengan proses penyiapan (*Due Process*) SAP yang merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan PSAP.

1. Riset terbatas
2. Penulisan draf Akuntansi RT dan RW
3. Pembahasan draf oleh dewan dosen dan mahasiswa
4. Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan
5. Penyajian draf akuntansi RT dan RW
6. Dengar pendapat publik (*public hearings*) dengan para *stakeholder*,
7. Analisis tanggapan dan masukan terhadap draf akuntansi RT/RW.
8. Finalisasi laporan akhir

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengumpulan Data

1. Sumber penerimaan RT/RW
Penerimaan RT/RW berasal dari dua sumber, yaitu masyarakat dan bantuan pihak luar. Penerimaan RT/RW ada yang bersifat rutin, dan ada pula yang bersifat spontanitas. Jenis penerimaan RT/RW juga terbagi menjadi dua yaitu: berbentuk tunai dan berbentuk bantuan program/ pekerjaan.
 - a. Penerimaan tunai
Yaitu bentuk penerimaan atau pemasukan yang diterima RT/RW berupa uang tunai, seperti: iuran rutin, dana jimpitan, denda ronda, pendapatan

administrasi, sewa alat inventaris bولوpecah, bantuan dari kelurahan/pemkot, bantuan dari sumbangan warga, dan lain-lain.

b. Bantuan program

Yaitu bentuk penerimaan yang diterima RT/RW yang tidak berupa uang tunai, tetapi berbentuk bantuan program/proyek dari Pemerintah Kota maupun Dinas Pekerjaan Umum, seperti: bantuan semen, paving, pengaspalan jalan, pembangunan selokan, dan lain-lain.

2. Pengeluaran RT/RW

Pengeluaran dana RT/RW ada yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Pengeluaran atau belanja juga terbagi menjadi pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.

a. Pengeluaran operasional

Pengeluaran operasional RT/RW diantaranya untuk: iuran rutin RW, biaya transport, biaya memperingati HUT RI, biaya memperingati tahun baru hijriah (1 sura), biaya sosial, biaya fotokopi, pembuatan proposal, biaya konsumsi rapat, dan lain-lain.

b. Pengeluaran modal

Yaitu pengeluaran yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, diantaranya untuk: pembangunan pos ronda, pembangunan gudang, pembelian inventaris bولوpecah, pembelian inventaris bukan bولوpecah, pembangunan jalan, pembangunan saluran air, pembelian TV, dan lain-lain.

3. Daftar hutang RT/RW kepada pihak ketiga atau masyarakat

Selain kewajiban membayar iuran RT/RW, masyarakat juga secara aktif mengikuti kegiatan (kelompok) yang dibentuk untuk tujuan tertentu, seperti PKK RT/RW, karangtaruna, dasa wisma, dan lain-lain. Biasanya dalam kegiatan ini warga sebagai anggota kelompok harus membayar iuran atau simpanan dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan.

4. Daftar kekayaan yang dimiliki/dikuasai RT/RW

Kekayaan (aset) yang dimiliki/dikuasai RT/RW ada yang berasal dari hasil swadaya murni masyarakat maupun dari bantuan pihak ketiga seperti dari Pemerintah atau donatur. Aset yang dimiliki dapat diperoleh dari kegiatan membangun sendiri, bantuan proyek atau pembelian langsung. Jenis aset yang dimiliki/dikuasai RT/RW diantaranya adalah:

a. Pos ronda atau pos keamanan

b. Inventaris bولوpecah, seperti: gelas/piring, meja/kursi, peralatan RT, dll.

c. Inventaris bukan bولوpecah, seperti: televisi, pengeras suara, bendera, dll.

d. Jalan

e. Saluran air

f. Penerangan

B. Data Penunjang Analisis

1. Fungsi yang terkait dalam struktur RT/RW

Struktur di tingkat RT/RW terdiri dari pengurus inti dan dibantu oleh seksi-seksi, mulai dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, seksi Pembangunan, Keamanan, Humas, Pendidikan dan Kepemudaan, Kesehatan dan Olah raga, Keagamaan

dan seksi lainnya. Selain kepengurusan RT/RW, juga terdapat kelompok-kelompok yang dibentuk untuk tujuan tertentu seperti: Kelompok Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dasawisma, karangtaruna, kelompok pengajian, kelompok bolopecah, kelompok sinoman, dan kelompok lainnya yang masing-masing memiliki otoritas dan kepengurusan sendiri.

2. Dokumen yang digunakan RT/RW

Pada dasarnya administrasi di tingkat RT/RW sudah berjalan cukup baik. Pemerintah kota/kabupaten melalui kelurahan telah memberikan bantuan berupa penyediaan blangko dan buku seperti: Blangko Surat Pengantar, Buku Ekspedisi, Buku Kas, Buku Inventaris atau Buku Barang, dan Buku Data Penduduk. Informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat dan pengurus RT/RW saat ini sebatas mengenai: jumlah kas, jumlah penerimaan dan pengeluaran kas, jenis dan jumlah barang/inventaris yang diterima dan keluar, dan data kependudukan.

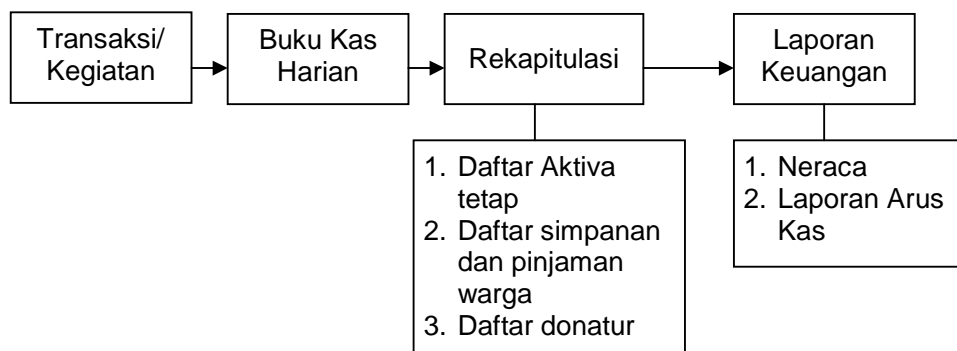
C. Penerapan Akuntansi Dana di Tingkat RT dan RW

1. Informasi yang Diperlukan

Guna lebih meningkatkan kualitas penyajian informasi diperlukan adanya akuntansi di tingkat RT/RW. Informasi tambahan dengan adanya penerapan akuntansi RT/RW selain jumlah kas, jumlah penerimaan dan pengeluaran kas RT/RW, jenis dan jumlah barang/inventaris yang diterima dan keluar, dan data kependudukan, adalah: jumlah dan daftar kekayaan RT/RW, jumlah dan daftar tagihan RT/RW, nilai persediaan, jumlah dan daftar kewajiban RT/RW, nilai inventaris, jumlah dan daftar penerimaan bantuan dalam suatu periode tertentu.

2. Siklus Akuntansi

Pada umumnya pencatatan akuntansi di tingkat RT/RW menerapkan sistem *single entry*. Dalam sistem ini pencatatan transaksi atau kegiatan hanya dilakukan satu kali yaitu pada buku kas harian. Selain sistem pencatatan, dasar akuntansi yang diterapkan di tingkat RT/RW pada umumnya juga menganut dasar kas (*cash basic*). Siklus akuntansi RT/RW dibuat lebih sederhana, menyesuaikan dengan praktek yang selama ini dilakukan. Penyederhanaan ini dibuat dengan pertimbangan agar lebih mudah diterima oleh pengurus RT/RW tanpa harus mengurangi nilai penyajian informasi akuntansinya.



Gambar 1: Siklus Akuntansi RT/RW

3. Elemen Laporan Keuangan RT/RW

Elemen laporan keuangan RT/RW dibuat lebih sedikit dengan format sesederhana mungkin. Berbeda dengan laporan keuangan komersial, untuk menghindari adanya kejenuhan dan penolakan dari pengurus RT/RW dalam penyusunan laporan keuangan. Elemen laporan keuangan hanya terdiri dari:

a. Neraca

Yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan RT/RW yang meliputi kekayaan (aset), utang dan dana pada suatu periode tertentu.

b. Laporan Arus Kas

Yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang besarnya saldo kas pada suatu periode tertentu serta seluruh penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode.

Penjelasan atas Neraca

a. Aktiva lancar

Aktiva lancar adalah aktiva-aktiva yang dapat dicairkan menjadi uang kas melalui kegiatan usaha normal suatu institusi. Aktiva lancar pada tingkat RT/RW terdiri dari: kas, piutang, dan persediaan. Khusus tingkat RT biasanya ada semacam iuran atau simpanan yang dibayarkan kepada tingkat RW, demikian juga pada tingkat RW ada semacam iuran atau simpanan yang dibayarkan ke kelurahan.

1) Kas adalah sejumlah uang yang dikuasai oleh RT/RW baik dalam bentuk tunai maupun saldo uang yang ada di lembaga keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan kas yang dilaporkan adalah yang dikuasai RT/RW dan dapat digabungkan dengan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok dalam RT/RW.

2) Piutang adalah sejumlah klaim atau tagihan kepada peminjam baik yang berstatus sebagai warga apabila mengajukan pinjaman kepada RT atau RT yang mengajukan pinjaman kepada RW. Dalam penyusunan laporan keuangan piutang yang dilaporkan adalah yang dikuasai RT/RW dan dapat digabungkan dengan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok dalam RT/RW.

3) Persediaan adalah barang atau material yang dikuasai oleh RT/RW baik yang dibeli maupun yang berasal dari bantuan/hibah yang apabila dipakai akan mengurangi kuantitasnya, misalnya: semen, pasir, batu bata, dan sebagainya.

b. Aktiva tetap

Aktiva tetap adalah aktiva-aktiva yang berwujud dan berumur relatif panjang, yang dibeli, dibuat/dibangun, atau yang berasal dari bantuan/hibah yang apabila digunakan untuk membantu usaha dan kegiatan-kegiatan RT/RW tidak mengurangi kuantitasnya. Dalam aktiva tetap terdapat akun kerusakan/kehilangan, penjelasannya ada di penjelasan laporan arus kas.

c. Utang

Utang adalah jumlah kewajiban kepada kreditur yang harus dipenuhi karena RT/RW menerima sejumlah dana, baik untuk tujuan penghimpunan maupun

untuk operasional kegiatan. Kreditur RT umumnya warga masyarakat RT setempat misalnya warga menyimpan dalam bentuk tabungan kepada bendahara RT, sedangkan kreditur RW umumnya RT-RT yang menjadi bagiannya. Penyajian utang RT/RW dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang diakui RT/RW/kelompok-kelompok dalam RT/RW (bila digabungkan), utang kepada pihak III, dana sosial (apabila dibentuk) dan dana kelompok yang ditanamkan di RT/RW. Sesuai jatuh temponya utang dapat dikelompokkan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang

d. Ekuitas

Ekuitas RT/RW diartikan sebagai kekayaan sendiri atau hak yang dimiliki RT/RW dalam aktiva-aktiva RT/RW. Dalam arti sempit ekuitas RT/RW adalah selisih lebih aktiva-aktiva RT/RW dikurangi dengan utang-utang RT/RW. Ekuitas RT/RW diperoleh dari: bantuan Pemerintah, bantuan donatur, hadiah, cadangan dan dana mandiri RT/RW. Bantuan yang dimasukkan dalam neraca adalah bantuan yang berupa barang/material atau pekerjaan, sedangkan bantuan berupa uang kas dimasukkan dalam laporan arus kas. Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan maka bantuan yang diperoleh harus bersifat resmi, jumlahnya material, terdapat bukti penerimaan, dan diketahui nilai nominalnya.

Penjelasan atas laporan arus kas

- a. Kegiatan rutin berarti kegiatan yang bersifat berkala atau berkesinambungan, baik itu harian, mingguan, bulanan atau tahunan.
- b. Penerimaan rutin adalah penerimaan yang diterima secara berkala misalnya dana penerikan jimpitan, iuran yang dipungut dari warga masyarakat dan RT seperti iuran sampah, dana sosial, iuran HUT RI dan sebagainya.
- c. Penerimaan usaha adalah penerimaan yang diperoleh RT/RW karena kegiatan atau pemanfaatan aktiva oleh warga, misalnya: pendapatan administrasi, sewa bolopecah, sewa lampu, kajang, dan sebagainya.
- d. Bantuan pihak III adalah bantuan berupa uang kas yang diperoleh dari pihak dalam maupun pihak luar RT/RW yang sifatnya menambah atau membantu secara keseluruhan kegiatan RT/RW. Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan maka bantuan yang diperoleh harus bersifat resmi, terdapat bukti penerimaan dan diketahui nilai nominalnya.
- e. Penerimaan lain-lain adalah penerimaan atau pendapatan yang diterima tidak secara berkala dan bukan merupakan kegiatan usaha RT/RW, misalnya denda tidak ronda malam.
- f. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang terjadi secara berkala baik itu secara harian, minggun, bulanan atau tahunan, misalnya: iuran RW, iuran kelurahan, biaya HUT RI, biaya malam 1 suro, biaya tukang angkut sampah, biaya keagamaan, dan sebagainya.
- g. Pengeluaran habis pakai (tidak rutin) adalah pengeluaran yang terjadinya tidak secara berkala tergantung pada kebutuhan atau keperluan misalnya untuk pembelian barang habis pakai, konsumsi, transport, biaya administrasi, dan sebagainya.
- h. Nilai kerusakan/kehilangan aktiva tetap adalah nilai atas kerusakan, kehilangan, atau berkurangnya fungsi aktiva karena disebabkan faktor alam

atau kesengajaan manusia. Nilai kerusakan/kehilangan ini merupakan pengganti dari biaya depresiasi dalam prinsip akuntansi umum, namun karena akuntansi RT/RW memiliki karakter tersendiri maka diganti menjadi nilai kerusakan/kehilangan.

- i. Pengeluaran lain-lain adalah pengeluaran atau biaya-biaya yang tidak termasuk dalam kategori biaya-biaya di atas, misalnya biaya tamu,

Pengelolaan keuangan di tingkat RT/RW tidak mengenal adanya anggaran, namun cukup perkiraan saja. Kegiatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan saldo kas yang dimiliki dan kekurangannya biasanya ditutup oleh donatur atau iuran tambahan dari warga.

Format Neraca RT/RW

RT /RW KEL.
KEC. KOTA
NERACA
PER

AKTIVA		UTANG & EKUITAS	
Aktiva Lancar		Utang Lancar	
Kas		- Tabungan warga/RT	xxx
- Kas RT/RW	xxx	- Tabungan Kelompok	xxx
- Kas Kelompok	xxx	- Utang pihak III	xxx
Total Kas	xxx	- Dana Sosial	xxx
		- Dana Kelompok	xxx
		Total Utang Lancar	xxx
Piutang		Utang Jangka Panjang	xxx
- Piutang warga/RT	xxx		
- Piutang Kelompok	xxx		
Total Piutang	xxx		
Persediaan	xxx		
Aktiva Tetap		Ekuitas	
- Inventaris RT/RW	xxx	- Bantuan Pemerintah	xxx
- Inventaris Kelompok	xxx	- Bantuan Donatur	xxx
- Pembangunan RT/RW	xxx	- Cadangan	xxx
- Kekayaan kelompok	xxx	- Dana mandiri	xxx
- Kerusakan/Kehilangan (xxx)		Total Ekuitas Dana	xxx
Aktiva Tetap	xxx		
Total Aktiva	xxx	Total Utang dan Ekuitas	xxx

Format Laporan Arus Kas

RT /RW KEL.
 KEC. KOTA
LAPORAN ARUS KAS
 s.d.

Saldo awal kas		xxx
Arus Kas Masuk:		
- Penerimaan rutin RT/RW	xxx	
- Penerimaan usaha RT/RW	xxx	
- Bantuan pihak III	xxx	
- Penerimaan lain-lain	<u>xxx</u>	
Total Kas Masuk		xxx
Arus Kas Keluar:		
- Pengeluaran rutin RT/RW	xxx	
- Pengeluaran habis pakai	xxx	
- Pengeluaran lain-lain	<u>xxx</u>	
Total Kas Keluar		<u>xxx</u>
Saldo akhir kas sumber		xxx

4. Daftar Pendukung

Selain elemen laporan keuangan di atas untuk menunjang efektivitas penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya data yang diperoleh dari daftar atau buku pembantu. Jumlah dari setiap daftar pendukung harus sama dengan jumlah dalam laporan keuangan (neraca). Berikut adalah format setiap daftar pendukung:

a. Daftar Aktiva Tetap

DAFTAR AKTIVA TETAP
TAHUN

No	Aktiva Tetap	Thn	Biaya Pembangunan/ Harga Beli	Nilai Kerusakan/ Kehilangan	Nilai Sisa
1	2	3	4	5	6

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persoalan di RT/RW tidak terbatas pada persoalan kebersihan, kerja bakti, keamanan, sosial dan masalah-masalah klasik lainnya. Namun ada persoalan lain yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang baik dan serius dari para pengurus RT/RW, pemerintah, maupun warga akan arti pentingnya pengelolaan administrasi yang lebih baik dengan penerapan akuntansi RT/RW untuk meningkatkan kualitas penyajian informasi keuangan.
2. Penerapan akuntansi di tingkat RT/RW dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas, fungsi manajerial, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Walaupun Standar Akuntansi Pemerintahan hanya mengatur di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, namun akuntansi di tingkat RT/RW dapat diterapkan.
3. Penerapan akuntansi di tingkat RT/RW tetap diupayakan menggunakan pendekatan dan prinsip yang diterima umum. Namun demikian karena pengelolaan keuangan dan transaksi-transaksi yang ada di tingkat RT/RW berbeda dengan di perusahaan atau sistem pemerintah pusat maupun daerah, maka dalam penerapan akuntansinya terdapat beberapa pengecualian.
4. Siklus akuntansi di tingkat RT/RW lebih sederhana dibandingkan dengan siklus akuntansi umum. Kemampuan akuntansi warga masyarakat yang relatif rendah, kompensasi pengurus RT/RW yang rendah, dan kurang adanya dukungan dari Pemerintah Daerah/Kota dapat menjadi kendala dalam penerapan akuntansi RT/RW, untuk itu perlu dilakukan pendekatan yang lebih arif dan strategi bagaimana akuntansi RT/RW ini dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Penerapan akuntansi untuk kelompok atau perkumpulan warga di tingkat RT/RW yang terdiri dari: Kelompok PKK, Dasawisma, Kelompok Bolopecah, Karangtaruna (KTI), Kelompok Pengajian, dan sebagainya, dapat digabungkan agar informasi yang dihasilkan lebih komprehensif (tidak parsial).
6. Laporan keuangan RT/RW yang terdiri dari Neraca RT/RW dan Laporan Arus Kas, beserta daftar pendukungnya seperti: Buku Kas Harian, Daftar Persediaan, Daftar Aktiva Tetap, Daftar Simpanan Warga, Daftar Pinjaman Warga, Kartu Simpan-Pinjam Warga, dan Daftar Pemberi Sumbangan.

B. Saran

Adanya tuntutan transparansi, obyektifitas dan perbaikan kinerja manajerial baik dari pemerintah maupun masyarakat diperlukan adanya peningkatan tertib administrasi dengan mencoba menerapkan akuntansi RT/RW.

1. Pengurus RT/RW harus menyadari arti penting penerapan akuntansi RT/RW dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan/dana, baik dari masyarakat maupun pemerintah.
2. Pemerintah Kota/Daerah tetap mendorong/memfasilitasi penerapan akuntansi RT/RW berupa pemberian kompensasi yang lebih layak bagi pengurus RT/RW serta dukungan regulasi (peraturan daerah)
3. Masyarakat tetap memberi masukan dan dukungan konstruktif dalam peningkatan dan percepatan program-program pembangunan di tingkat RT/RW.

Daftar Pustaka

Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.

Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 1997, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE.

Gede Edy Prasetya, 2005, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Andi.

Indra Bastian, 2003, *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan*, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sofyan Safri Harahap, 2005, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Rajawali Press.

Swardjono, 2003, *Akuntansi Pengantar: Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem*, Buku 1, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara